

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian.

Data penelitian ini diambil dari Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Data ini menyangkut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi produk Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), tetapi semuanya berawal dari turunnya bantuan dari Asian Development Bank (ADB) ke Departemen Keuangan (DEPKEU) untuk membangun Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) dengan berbasiskan pada Regulasi Pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/1199/BAKD tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Surat Edaran Mendagri Nomor 900/984/BAKD tanggal 21 September 2006 dan Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan regional SIKD.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. Untuk mencapai tujuan ini, penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait SIPKD dan juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penelitian ini adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Beberapa dokumen terkait yang diperlukan oleh penulis untuk melihat efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan mengidentifikasi Input, Proses dan Output data penyusunan SIPKD seperti Modul *Utility*, Modul *Data Master*, Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, Modul Akuntansi dan Pelaporan serta menganalisis penerapan SIPKD berdasarkan indikator efektivitas sistem informasi yakni Keamanan Data, Waktu, Ketelitian, Variasi Laporan atau *output* dan relevansi.

Identitas responden pada sub bidang pelaporan keuangan yang berjumlah 25 orang dari 232 pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang diteliti dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin dan umur.

5.1.1 Jenis Kelamin

Hasil penelitian bahwa responden yang diteliti menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.1.1 berikut ini:

Tabel 5.1.1 Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	Laki-Laki	14	60
2	Perempuan	11	40
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Primer

Pegawai yang diambil sebagai responden yang bekerja pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah laki-laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 11 orang.

5.1.2 Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang diteliti berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel 5.1.2 berikut ini:

Tabel 5.1.2 Jumlah Responden berdasarkan umur

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	24-29	17	68
2	30-39	7	28
3	40-45	1	4
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Primer

Jenjang umur bagi suatu organisasi sangatlah penting. Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang terlihat bahwa umur 24-29 mendominasi kantor tersebut.

5.2 Proses Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang akan mengelola keuangan daerah melalui proses pengoperasian aplikasi yang dimulai dari Modul *Utility*, Modul Data *Master*, Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Modul Akuntansi dan Pelaporan.

1. Melakukan Identifikasi Input, Proses dan Output Modul Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelum menggunakan aplikasi ini, terdapat pengaturan-pengaturan yang harus menjamin jalannya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah untuk dapat dihasilkan informasi yang akurat dan handal sehingga dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pengaturan ini dilakukan dengan menggunakan Modul *Utility* dan Modul Data *Master* sebagai modul penunjang

a) Modul Utility

Modul *Utility* merupakan modul penunjang bagi tiga modul utama terkait pengoperasian aplikasi secara umum. Dalam modul ini mengatur terkait dengan pengaturan *user*/pengguna beserta password yang hanya dilakukan oleh para pegawai yang sudah diberikan *user*

ID yang berbeda-beda, Pengaturan Hak Akses Kelompok yang berfungsi mengatur kelompok pengguna yang ada pada aplikasi dan juga back up database yang berfungsi untuk memback up database perencanaan yang telah di entri.

Tabel 5.1 Modul Utility

Input	Proses	Output
a) Pengaturan user/ pengguna	Pengaturan pengguna dilakukan sebagai kontrol atas pengguna aplikasi yang bertujuan untuk menjamin keandalan data dengan membatasi hak dan wewenang pengguna aplikasi ini dalam pelaksanaan transaksi. Pembuatan hak akses ini dilakukan oleh <i>administrator</i> .	Tampilan form isian data pengguna
b) Pemberian Hak Akses Kelompok	Melakukan pengaturan mengenai hak akses kelompok dalam menggunakan aplikasi. Pengaturan ini dilakukan dengan memilih menu pengaturan pada hak akses pengguna	Tampilan formulir pemberian hak akses kelompok
c) Program backup database aplikasi	Cara untuk membackup database aplikasi adalah dengan memilih menu perencanaan lalu sub menu <i>utility</i> lalu sub menu backup data	Tampilan form isian backup database

Sumber: Diolah tahun 2019

Tabel 5.2
Pendapat Para Pegawai terhadap penggunaan Modul Utility

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	9	36
2	Efektif	11	44
3	Kurang Efektif	5	20
4	Tidak Efektif	-	-
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.1 proses penginputan data pada modul utility awal sudah berjalan sesuai dengan panduan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Output yang dihasilkan dari Modul *Utility* adalah benar-benar ada yakni berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsurifal selaku operator SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada Senin, 24 Juni 2019.

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai penggunaan Modul *Utility*, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 9 orang atau 36%, yang menyatakan efektif sebanyak 11 orang atau 44%, yang menyatakan pendapat kurang efektif sebanyak 5 orang atau 20%, sedangkan tidak ada yang menyatakan tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 9 orang yang menjawab $SE = 9 \times 5 = 45$

Jumlah skor untuk 11 orang yang menjawab $E = 11 \times 4 = 44$

Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab $KE = 5 \times 3 = 15$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $TE = 0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah	104
--------	-----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap penggunaan modul utility adalah: $(104 : 125) \times 100\% = 83,2\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Utility sebanyak 83,2% artinya efektif

b) Modul Data Master.

Modul Data *Master* merupakan modul penunjang bagi tiga modul utama dalam beberapa hal terkait pengoperasian aplikasi yang mengatur data-data yang menjadi syarat dalam penggunaan aplikasi pada modul-modul berikutnya. Dalam modul ini mengatur terkait program dan kegiatan untuk menyiapkan daftar nama-nama program dan kegiatan yang bersumber dari KUA/PPAS. Aplikasi SIPKD menyediakan nama program dan kegiatan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah yang bersumber dari permendagri No. 13 tahun 2006. Modul data *master* juga mengatur unit organisasi untuk melakukan entry data OPD berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah dan juga menyiapkan daftar kode rekening yang akan digunakan pada tahun berjalan masing-masing pemerintah daerah yang terdiri dari rekening pendapatan, belanja, pembiayaan serta rekening neraca.

Tabel 5.3 Modul Data Master

Input	Proses	Output
a) Penyiapan Data <i>Master</i> program dan kegiatan	Untuk mengentry data pada modul data <i>master</i> , klik pada tombol data <i>master</i>	Data organisasi, daftar program dan kegiatan OPD.
b) Melakukan <i>setting</i> daftar OPD atau unit organisasi	Dilakukan untuk pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan data dasar disyaratkan untuk menjamin berjalannya sistem pengendalian internal	a. Daftar Pegawai, Bendahara dan Atasan Langsung b. Daftar urusan dan organisasi c. Penandatanganan dokumen.
c) Melakukan <i>setting</i> kode rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca	Pengaturan pendapatan dilakukan dengan memilih sub menu pendapatan didalam menu RKA; Pengaturan belanja dilakukan dengan memilih sub menu belanja langsung di dalam menu RKA; pengaturan pembiayaan dilakukan dengan memilih sub menu belanja pembiayaan didalam menu RKA.	a. Daftar Rekening Pendapatan b. Daftar Rekening Pembiayaan c. Daftar Rekening Neraca

Sumber: Diolah tahun 2019

Tabel 5.4
Pendapat Para Pegawai terhadap penggunaan Modul Data Master

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	7	28
2	Efektif	14	56
3	Kurang Efektif	4	16
4	Tidak Efektif	-	-
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Dari tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan data-data dari input, proses, dan output pada modul utama yang sangat erat dengan data-data yang dihasilkan dari menu-menu pada modul data *master* ini, sehingga dilakukan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan data-data dasar yang disyaratkan untuk menjamin berjalannya sistem pengendalian internal. Output yang dihasilkan dari Modul Data *Master* adalah benar-benar ada yakni berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsurifal selaku operator SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada Senin, 24 Juni 2019.

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai penggunaan Modul Data *Master*, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 7 orang atau 28%, yang menyatakan efektif sebanyak 14 orang atau 56% , yang menyatakan kurang efektif sebanyak 4 orang atau 16% sedangkan tidak ada yang menyatakan pendapat tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 7 orang yang menjawab SE = $7 \times 5 = 35$

Jumlah skor untuk 14 orang yang menjawab E = $14 \times 4 = 56$

Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab KE = $4 \times 3 = 12$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab TE = $0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab STE = $0 \times 1 = 0$

Jumlah	103
--------	-----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap penggunaan Modul Data Master adalah: $(103 : 125) \times 100\% = 82,4\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Data *Master* sebanyak 82,4% dan terletak pada daerah efektif (E).

c) Modul Penganggaran

Modul Penganggaran berfungsi untuk membantu proses penyusunan dokumen-dokumen anggaran. proses untuk melakukan penerbitan buku Perda pada saat itu juga SIPKD dapat langsung mencetaknya, dengan kata lain inputan awal, jika data RKA OPD sudah final maka RKA dan buku Perda, Pergub APBD bisa dicetak secara otomatis baik per OPD maupun Per Pemda.

Dalam Modul Penganggaran ini juga data DPA semua OPD baik DPA Pendapatan, DPA Belanja Langsung, DPA Belanja Tidak Langsung dan DPA Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran) tidak perlu melakukan input data ulang, tetapi hanya melakukan transfer data dari RKA menjadi DPA sehingga data RKA sama dengan data DPA APBD (Perda dan Pergub) pada saat itu juga DPA bisa langsung dicetak.

Tabel 5.5 Modul Penganggaran

Input	Proses	Output
a) Input data RKA: 1. RKA Pendapatan 2. RKA Belanja Langsung	Untuk penggunaan menu RKA pada aplikasi, operator harus terlebih dahulu melakukan <i>setting</i>	a) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). b) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. RKA Belanja Tidak Langsung 4. RKA Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan	tahap aplikasi dari menu utama pada modul penganggaran yaitu tahapan Ranperda APBD, apabila secara <i>default</i> menu sudah berada dalam tahapan ini, maka proses pemindahan tahapan tidak perlu dilakukan	(RAPBD) c) APBD beserta ringkasan dan penjabarannya
b) Input Data DPA OPD 1. DPA Pendapatan 2. DPA Belanja Langsung 3. DPA Belanja Tidak Langsung 4. DPA Pembiayaan	Untuk dapat melakukan penyusunan anggaran dengan menggunakan aplikasi, klik icon modul penganggaran pada menu utama aplikasi	a. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) b. Surat Penyediaan Dana (SPD) c. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) e. APBD perubahan beserta ringkasan dan penjabarannya

Sumber: Diolah tahun 2019

Tabel 5.6
Pendapat Para Pegawai terhadap penggunaan Modul Penganggaran

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	8	32
2	Efektif	13	52
3	Kurang Efektif	3	12
4	Tidak Efektif	1	4

5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Dari tabel 5.5 diatas, dapat dilihat bahwa dalam proses menghasilkan dokumen-dokumennya modul untuk melakukan penerbitan buku Perda pada saat itu juga SIPKD dapat langsung mencetaknya, dengan kata lain inputan awal, jika data RKA OPD sudah final maka RKA dan buku Perda, Pergub APBD bisa dicetak secara otomatis baik per OPD maupun Per Pemda.

Dalam Modul Penganggaran ini juga data DPA semua OPD baik DPA Pendapatan, DPA Belanja Langsung, DPA Belanja Tidak Langsung dan DPA Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran) tidak perlu melakukan input data ulang, tetapi hanya melakukan transfer data dari RKA menjadi DPA sehingga data RKA sama dengan data DPA APBD (Perda dan Pergub) pada saat itu juga DPA bisa langsung dicetak. Output yang dihasilkan dari Modul Penganggaran adalah benar-benar ada yakni berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsurifal selaku operator SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada Senin, 24 Juni 2019.

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai penggunaan Modul Penganggaran, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 8 orang atau 32%, yang menyatakan efektif sebanyak 13 orang atau 52% , yang menyatakan kurang efektif sebanyak 3 orang atau 12% , yang menyatakan pendapat tidak efektif

sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan tidak ada yang menyatakan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 8 orang yang menjawab $SE = 8 \times 5 = 40$

Jumlah skor untuk 13 orang yang menjawab $E = 13 \times 4 = 52$

Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab $KE = 3 \times 3 = 9$

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab $TE = 1 \times 2 = 2$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah	103
--------	-----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap penggunaan modul utility adalah: $(103 : 125) \times 100\% = 82,4\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Penganggaran sebanyak 82,4% dan terletak pada daerah efektif (E).

d) Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan merupakan modul yang berfungsi membantu proses penatausahaan pelaksanaan APBD, terkait dengan kontrol atas ketaatan terhadap anggaran yang dilakukan oleh sistem dan penerbitan serta pencatatan dokumen-dokumen. Sebelum SP2D cair, yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terlebih dahulu yaitu pengajuan SPP UP/GU/TU/LS. Di dalam SPP tersebut terdapat rincian belanja. Pengajuan yang diajukan, sesuai dengan kebutuhan belanja OPD. Setelah

SPP UP/GU/TU/LS diajukan, Bendahara Pengeluaran membuat SPM dan disahkan oleh PA untuk mencairkan SP2D UP/GU/TU/LS.

Setelah di validasi oleh bagian Kasda dan disetujui oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), maka SP2D tersebut dapat dicairkan. SP2D UP/GU/TU dimasukan ke dalam buku pembantu simpanan bank Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu. Setelah itu baru dimasukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah SP2D cair dan dibagikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka SP2D tersebut dibelanjakan dan bukti dari belanja tersebut dikumpulkan sebagai bahan pembuatan pertanggungjawaban administratif.

Tabel 5.7 Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan

Input	Proses	Output
a) Input data SP2D UP b) Input data SP2D GU/TU c) Input data SP2D Belanja Langsung d) Input SP2D Pembiayaan e) Input data SP2D Belanja Tidak Langsung dan Tunjangan f) Input data SP2D Belanja Tidak Langsung PPKD	Untuk menggunakan fasilitas pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, klik <i>icon</i> modul pelaksanaan dan penatausahaan; setelah semua data SP2D sudah diinput maka akan dilakukan validasi kasda yang artinya bahwa SP2D tersebut telah cair.	a. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) b. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) d. Surat Permintaan Membayar (SPM) e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) f. Daftar Penguji (DP) g. Surat Pertanggungjawabana n (SPJ) h. Surat Tanda Setoran (STS)

		i. Buku Kas Umum (BKU) j. Kartu Kendali Belanja Tak Langsung k. Kartu Kendali Kegiatan
--	--	--

Sumber: Diolah tahun 2019

Tabel 5.8
Pendapat Para Pegawai terhadap penggunaan Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	6	24
2	Efektif	14	56
3	Kurang Efektif	4	16
4	Tidak Efektif	1	4
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, mengenai Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum dijalankan secara maksimal karena sering terjadi kesalahan penginputan data yang di lakukan oleh OPD yakni:

- 1 Adanya TBP dan STS yang belum dibukukan pada BKU bendahara penerimaan di sebabkan karena bendahara pada OPD tersebut kurang memperhatikan setiap transaksi yang terjadi. Seringkali terlupakan karena dalam satu hari banyak terjadi transaksi yang mungkin membuat mereka kewalahan sehingga dokumen seperti TBP dan STS terkadang tidak di input.

2 Adanya TBP dan STS yang belum disahkan pada menu persetujuan.

Dalam aplikasi SIPKD ini terdapat banyak menu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Masalah yang sering terjadi pada OPD salah satunya juga adalah TBP dan STS belum disahkan pada menu persetujuan. Menu persetujuan ini berfungsi untuk menunjukkan tanggal yang valid pada setiap transaksi yang terjadi. Faktanya adalah kebanyakan dari para pegawai dalam OPD kurang paham terkait icon ini sehingga terkadang ketika mereka menginput sesuatu akan terinput akan tetapi tidak terbaca dalam modul lainnya karena tanggal transaksinya belum disahkan dalam menu persetujuan.

3 Adanya TBP dan STS yang tidak nyambung. Terdapat menu yang digunakan untuk mengentri transaksi penyetoran uang dengan bukti STS dari sebuah pengakuan pendapatan, penerimaan pembiayaan maupun penerimaan non anggaran. Jenis transaksi penyetoran terdiri dari:

- a. Penerimaan Tunai: apabila penyetoran ke KASDA secara tunai, artinya melalui proses penerimaan TBP terlebih dahulu.
- b. Penerimaan Rekening Bendahara: apabila penyetoran ke KASDA melalui transfer dari rekening bendahara penerimaan, artinya juga didahulukan dengan adanya proses penerimaan TBP terlebih dahulu.

- c. Penerimaan Rekening BUD: apabila penerimaan dari pendapatan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan tetapi langsung ke KASDA, maka tidak melalui proses TBP.

Hal diatas menyangkut pemahaman para pegawai tentang pengoperasian aplikasi SIPKD dan fungsi setiap icon di dalamnya. Mereka sering kali bingung untuk menggunakan pilihan icon dalam aplikasi SIPKD karena tidak dapat membedakan jenis penerimaan apa yang digunakan sehingga ketika yang sebenarnya digunakan adalah penerimaan tunai atau penerimaan rekening bendahara tetapi mereka memilih penerimaan rekening BUD maka dengan sendirinya akan terjadi pendobelan pengakuan pada saat menginput data.

Output yang dihasilkan dari Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan adalah benar-benar ada yakni berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsurifal selaku operator SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada Senin, 24 Juni 2019.

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai penggunaan Modul Penganggaran, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 6 orang atau 24%, yang menyatakan efektif sebanyak 14 orang atau 56% , yang menyatakan kurang efektif sebanyak 4 orang atau 16% , yang menyatakan pendapat tidak efektif sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan tidak ada yang menyatakan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 6 orang yang menjawab $SE = 6 \times 5 = 30$

Jumlah skor untuk 14 orang yang menjawab $E = 14 \times 4 = 56$

Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab $KE = 4 \times 3 = 12$

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab $TE = 1 \times 2 = 2$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah	100
--------	-----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap penggunaan modul pelaksanaan dan penatausahaan adalah: $(100: 125) \times 100\% = 80\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan sebanyak 80% dan terletak pada daerah efektif (E).

e) Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Modul Akuntansi dan Pelaporann merupakan alat bantu aplikasi guna mendukung proses pelaksanaan akuntansi daerah. Adapun syarat-syarat untuk menghasilkan dokumen-dokumen dalam modul ini, tersedianya data-data transaksi dari masing-masing SKPD secara detail/lengkap per dokumen transaksi, antara lain data-data sebagai berikut Buku Penerimaan dan Penyetoran SKPD – berisikan data-data

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran SKPD – berisikan data-data STS Pendapatan dari masing-masing Bendahara Penerimaan SKPD.

2. Buku Penerimaan dan Penyetoran PPKD – Berisikan data-data STS Pendapatan dari Bendahara Penerimaan PPKD.
3. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran – berisikan data-data SP2D (UP, GU, TU, LS) dan kwitansi-kwitansi belanja (BPK- Bukti Pengeluaran Kas) dan bukti terima dan setor pajak dari transaksi belanja yang melalui Bendahara.
4. SPJ Bendahara Pengeluaran – berisikan pertanggungjawaban bulanan dari transaksi-transaksi belanja.
5. Buku Kas Umum BUD – berisikan data-data penerimaan STS dan pencairan SP2D dari rekening Kas Daerah.
6. Jurnal Korolari – berisikan jurnal pengakuan Aset tetap atas kapitalisasi dari transaksi belanja yang mempengaruhi aset tetap baik dari belanja modal, maupun belanja barang dan jasa kebijakan akuntansi yang diberlakukan.
7. Jurnal Memorial – berisikan jurnal penyesuaian atas rekening APBD maupun jurnal-jurnal pengakuan atas rekening neraca seperti Piutang, Persediaan, Investasi dan Hutang.
8. Neraca Awal per SKPD dan Neraca Awal PPKD.

Kebutuhan detail data transaksi diatas akan terpenuhi dengan mudah apabila Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan telah dioperasikan secara penuh oleh seluruh SKPD.

Tabel 5.9 Modul Akuntansi dan Pelaporan

Input	Proses	Output
Input dari jurnal yang kemudian di posting ke buku besar dan buku besar dijadikan dasar untuk membuat neraca saldo	Proses pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah baik di OPD maupun di SKPKD	a. Jurnal Penerimaan Kas b. Jurnal Pengeluaran Kas c. Jurnal SPJ d. Jurnal Transfer Kas e. Buku Besar Pendapatan f. Buku Besar Belanja g. Buku Besar Pembiayaan h. Laporan Realisasi Anggaran (Semesteran dan Tahunan) i. Neraca j. Laporan Arus Kas

Sumber: Diolah tahun 2019

Tabel 5.10
Pendapat Para Pegawai terhadap penggunaan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	7	28
2	Efektif	16	64
3	Kurang Efektif	1	4
4	Tidak Efektif	1	4
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.9 dapat dilihat bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum berjalan maksimal yakni

pada laporan keuangan yang menjadi output pada modul akuntansi dan pelaporan merupakan hasil pengolahan data transaksi dari modul pelaksanaan dan penatausahaan. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada modul-modul sebelumnya akan berpengaruh terhadap modul akuntansi dan pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan.

Output yang dihasilkan dari Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah benar-benar ada yakni berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsurifal selaku operator SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada Senin, 24 Juni 2019.

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai penggunaan Modul Akuntansi dan Pelaporan, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 7 orang atau 28%, yang menyatakan efektif sebanyak 16 orang atau 64% , yang menyatakan kurang efektif sebanyak 1 orang atau 4% , yang menyatakan pendapat tidak efektif sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan tidak ada yang menyatakan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab $SE = 7 \times 5 = 25$

Jumlah skor untuk 16 orang yang menjawab $E = 16 \times 4 = 60$

Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab $KE = 1 \times 3 = 3$

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab $TE = 1 \times 2 = 2$

$$\frac{\text{Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab STE} = 0 \times 1 = 0}{\text{Jumlah} \quad 100}$$

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap penggunaan Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah: $(100 : 125) \times 100\% = 80\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Akuntansi dan Pelaporan sebanyak 80% dan terletak pada daerah efektif (E).

2. Menganalisis penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan indikator efektivitas sistem informasi.

a) Keamanan Data.

Keamanan data dalam hal ini adalah berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi akses ilegal dan kerusakan pada sistem (Bodnar :2000).

Dalam hal ini Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) khususnya Modul *Utility* sebagai tools penyiapan data awal melakukan penyiapan User Id dan pengaturan hak akses masing-masing operator dengan User Id yang berbeda-beda agar dapat diketahui operator-operator yang telah menginput data.

Tabel 5.11 Keamanan Data

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	4	16
2	Efektif	21	84
3	Kurang Efektif	-	
4	Tidak Efektif	-	
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai indikator keamanan data yang menyatakan sangat efektif sebanyak 4 orang atau 16%, yang menyatakan efektif sebanyak 21 orang atau 84% sedangkan tidak ada yang menyatakan pendapat kurang efektif, tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab $SE = 4 \times 5 = 20$

Jumlah skor untuk 21 orang yang menjawab $E = 21 \times 4 = 84$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $KE = 0 \times 3 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $TE = 0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah 104

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden indikator keamanan data adalah: $(104: 125) \times 100\% = 83,2\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh

25 responden maka jawaban responden mengenai indikator keamanan data sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah efektif (E).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abraham Seran, Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

“Mereka yang ditunjuk sebagai operator sudah diberikan hak untuk mengakses dengan user Id yang berbeda sehingga tidak sembarang orang bisa membuka aplikasi SIPKD ini. Dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kami melakukan penyimpanan data dengan cara disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy, Sistem selalu di upgrade agar mencegah kerusakan akibat virus komputer, mengantisipasi akses ilegal yaitu dengan mengganti password secara berkala serta untuk kerusakan pada sistem ditangani dengan cara berkoordinasi dengan tim Pusat Data Elektronik. “

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah Keamanan data dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang secara otomatis dikatakan aman karena dalam modul *utility* yang merupakan modul penunjang bagi modul-modul lainnya, dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka melakukan penyimpanan data dengan cara laporan keuangan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Selanjutnya untuk mengantisipasi akses ilegal yaitu dengan mengganti password secara berkala serta untuk kerusakan pada sistem ditangani dengan cara berkoordinasi dengan tim Pusat Data Elektronik.

b) Waktu

Fenomena waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Kecepatan sistem

informasi merupakan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu informasi untuk rentang waktu yang telah ditentukan. (Bodnar :2000)

Kecepatan serta ketepatan informasi dalam menggunakan aplikasi SIPKD dinilai lebih baik karena dalam melakukan proses menjadi output baik secara periodik maupun non periodik dapat dilihat dengan kecepatan sistem dalam melakukan input data, penanganan berbagai transaksi, penyajian data yang sewaktu-waktu dibutuhkan serta tidak menggunakan sistem manual (Microsoft Excel).

Tabel 5.12 Indikator Waktu

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	10	40
2	Efektif	10	40
3	Kurang Efektif	4	16
4	Tidak Efektif	1	4
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.12 menunjukan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai indikator waktu, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 10 orang atau 40%, yang menyatakan efektif sebanyak 10 orang atau 40% , yang menyatakan kurang efektif sebanyak 4 orang atau 16% , yang menyatakan pendapat tidak efektif sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan tidak ada yang menyatakan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 9 orang yang menjawab SE = $10 \times 5 = 50$

Jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab E = $10 \times 4 = 40$

Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab KE = $4 \times 3 = 12$

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab TE = $1 \times 2 = 2$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab STE = $0 \times 1 = 0$

Jumlah 104

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap indikator waktu adalah: $(104 : 125) \times 100\% = 83,2\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator waktu sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah efektif (E).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abraham Seran, Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

“Kadang memang ada kendala teknis seperti koneksi internet yang terganggu, disebabkan karena listrik yang padam tiba-tiba akan tetapi mengenai kecepatan waktu itu sangat cepat, tidak membuang banyak waktu karena semuanya sudah tersetting secara otomatis pada modul data master. kami sudah semaksimal mungkin meminimalisir adanya kendala teknis dan selalu upgrade biar sistemnya tidak lambat tapi itupun tergantung dari koneksi internetnya saja,”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah untuk kecepatan waktu dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dikatakan berjalan dengan

cepat tanpa harus menunggu lama karena sudah tersetting secara otomatis pada modul data *master*, akan tetapi ada beberapa kendala yang sering terjadi yakni koneksi internet yang terkadang mengalami gangguan dan juga dari Sumber Daya Manusianya.

c) Ketelitian.

Fenomena Ketelitian merupakan kemampuan sistem dalam memproses data dengan teliti dan bebas dari kesalahan dan dapat menyajikan informasi secara tepat dan akurat. Variabel ini dapat diukur dengan melihat ketelitian sistem dalam melakukan pencarian data, input data, Pengolahan data dan penyajian data.

Tabel 5.13 Indikator Ketelitian

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	5	20
2	Efektif	10	40
3	Kurang Efektif	9	36
4	Tidak Efektif	1	4
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai indikator ketelitian, yang menyatakan sangat efektif sebanyak 5 orang atau 20%, yang menyatakan efektif sebanyak 10 orang atau 40% , yang menyatakan kurang efektif sebanyak 9 orang atau 36% , yang menyatakan pendapat tidak efektif sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan tidak ada yang menyatakan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab $SE = 5 \times 5 = 25$

Jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab $E = 10 \times 4 = 40$

Jumlah skor untuk 9 orang yang menjawab $KE = 9 \times 3 = 27$

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab $TE = 1 \times 2 = 2$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah	94
--------	----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap indikator ketelitian adalah: $(94: 125) \times 100\% = 75,2\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator ketelitian sebanyak 75,2% dan terletak pada daerah Kurang efektif (KE).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abraham Seran, Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

”SIPKD ini telah di sediakan modul-modul beserta fungsinya, apabila terkait dengan ketelitian ini, ada pada modul data master karena semua data program dan kegiatan serta kode rekening telah di setting pada modul data master. menurut saya SIPKD yang kami jalankan terkait ketelitiannya belum maksimal karena ssering terjadi kesalahan penginputan data akibat setiap OPD yang belum menggunakan aplikasi SIPKD tetapi masih menggunakan sistem manual (exel) sehingga sulit diketahui kesalahannya misalnya dalam penginputan data sering terjadi pendobelan pengakuan pada dokumen TBP dan STS”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah untuk ketelitian dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dikatakan kurang teliti karena masih melakukan kesalahan pada proses input, pengolahan dan penyajian data khususnya pada dokumen TBP dan STS.

d) Variasi laporan atau *output*.

Fenomena variasi laporan atau *output* berhubungan dengan kelengkapan isi informasi yang dimiliki oleh laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini, kelengkapan isi informasi tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan.

Tabel 5.14 Indikator Variasi Laporan

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	7	28
2	Efektif	15	60
3	Kurang Efektif	3	12
4	Tidak Efektif		
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.14 menunjukkan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai indikator keamanan data yang menyatakan sangat efektif sebanyak 7 orang atau 28%, yang menyatakan efektif sebanyak 15 orang atau 60% , yang menyatakan pendapat kurang efektif sebanyak 3 orang atau 12%, sedangkan tidak ada yang menyatakan tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 7 orang yang menjawab $SE = 7 \times 5 = 35$

Jumlah skor untuk 15 orang yang menjawab $E = 15 \times 4 = 60$

Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab $KE = 3 \times 3 = 9$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $TE = 0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah	104
--------	-----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap indikator variasi laporan adalah: $(104 : 125) \times 100\% = 83,2\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator variasi laporan sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah efektif (E).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abraham Seran, Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

“ Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan rincian objek sudah sesuai dengan format yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sudah variatif dalam pembuatan laporan keuangan karena sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

e) Relevansi

Relevansi merupakan data yang disajikan sistem sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Variabel ini dapat diukur dengan melihat relevansi sistem terhadap pencatatan data antar bagian yang ada, relevansi dalam analisis data, relevansi dalam penyajian data, relevansi dalam pengolahan dan penyimpanan data, Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tentu saja dianggap lebih mempermudah pekerjaan bendahara dan dinilai lebih efektif daripada penggunaan sistem manual (Microsoft Excel).

Tabel 5.14 Indikator Relevansi

No	Jawaban Responden	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1	Sangat Efektif	8	32
2	Efektif	16	64
3	Kurang Efektif	1	4
4	Tidak Efektif		
5	Sangat Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber: Diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.15 menunjukkan persentase terbesar yang menyatakan pendapat mengenai indikator relevansi yang menyatakan sangat efektif sebanyak 8 orang atau 32%, yang menyatakan efektif sebanyak 16 orang atau 64% , yang menyatakan pendapat kurang efektif sebanyak 1 orang atau 4%, sedangkan tidak ada yang menyatakan tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Data tersebut dapat dianalisis berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan maka:

Jumlah skor untuk 8 orang yang menjawab $SE = 8 \times 5 = 40$

Jumlah skor untuk 16 orang yang menjawab $E = 16 \times 4 = 64$

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab $KE = 1 \times 3 = 3$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $TE = 0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab $STE = 0 \times 1 = 0$

Jumlah	107
--------	-----

Jumlah untuk seluruh item = $5 \times 25 = 125$ (SE) skor tertinggi, jadi berdasarkan data diatas maka jumlah responden terhadap indikator relevansi adalah: $(107: 125) \times 100\% = 85,6\%$. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator relevansi sebanyak 85,6% dan terletak pada daerah Sudah Efektif (SE).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 yakni sebagai berikut:

“ Penyajian laporan keuangan yang kami lakukan mulai dari pencatatan data, analisis data, dan pembuatan laporan sudah sesuai dengan format yang ada dimana para pegawai merasa dipermudah dan sangat terbantu dengan penyajian antara sistem dan data yang relevan”.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yakni untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dikatakan relevan karena penyajian, pengolahan dan penyimpanan data sudah sesuai dengan format yang ada pada sistem.

5.3 Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.

1. Proses Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Dilihat dari segi pengidentifikasian Input, Proses dan Output modul Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD).

Modul *Utility* sebagai tools penyiapan data awal dari aplikasi SIPKD mulai penyiapan User Id dan pengaturan hak akses masing-masing User Id yang berbeda-beda. Modul *utility* menggambarkan fungsionalitas option atau settingan utama dalam aplikasi yang akan digunakan dalam modul penganggaran, modul pelaksanaan dan penatausahaan serta modul akuntansi dan pelaporan. Efektivitas dalam modul *utility* adalah mampu mengelola dan menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat dilihat dari settingan yang hanya dibuat satu kali dan digunakan pada semua modul. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Utility sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah efektif (E).

Modul Data *Master* dapat digunakan pada semua modul yakni modul penganggaran, modul pelaksanaan dan penatausahaan serta modul akuntansi dan pelaporan untuk mengolah data yang sudah tersusun sebelumnya pada data master. Efektivitas dalam modul data *master* ini adalah penyiapan data-

data awal yang sudah ditentukan administrator mulai dari data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), data kode rekening, data program dan data kegiatan yang distandarkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Data *Master* sebanyak 82,4% dan terletak pada daerah efektif (E).

Modul penganggaran ini akan terjadi input data secara otomatis yang sudah tersetting sehingga operator OPD/ operator bagian anggaran hanya menyesuaikan dengan kode rekening program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Efektivitas dalam modul penganggaran ini adalah dapat melakukan proses penyusunan RKA-OPD secara cepat karena sudah tersetting pada modul data master seperti kode rekening, program dan kegiatan. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Penganggaran sebanyak 82,4% dan terletak pada daerah efektif (E).

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan berfungsi membantu proses penatausahaan pelaksanaan APBD, terkait dengan kontrol atas ketaatan terhadap anggaran yang dilakukan oleh sistem dan penerbitan serta pencatatan dokumen-dokumen. Dalam modul ini belum dijalankan dengan baik karena sering kali terjadi kesalahan penginputan data pada TBP dan STS. Berdasarkan data yang

diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan sebanyak 80% dan terletak pada daerah efektif (E).

Modul Akuntansi dan Pelaporan merupakan alat bantu aplikasi guna mendukung proses pelaksanaan akuntansi daerah. Dalam modul ini juga belum berjalan baik karena laporan keuangan yang dihasilkan dalam modul akuntansi dan pelaporan merupakan hasil pengolahan data dari modul pelaksanaan dan penatausahaan. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai Modul Akuntansi dan Pelaporan sebanyak 80% dan terletak pada daerah efektif (E).

Rata-rata jawaban responden

Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan jawaban responden diatas , maka dapat dihitung rata-rata jawaban responden :

$$\frac{83,2\%+82,4\%+82,4\%+80\%+80\%}{5} = 81,6\%$$

5

2. Penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) Dilihat dari Indikator Efektivitas Sistem Informasi.

a. Keamanan Data

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, apabila dilihat dari indikator keamanan data dikatakan efektif dalam hal ini aman karena dalam modul *utility* yang merupakan modul penunjang bagi modul-modul lainnya, dalam mengantisipasi hal-hal yang

tidak diinginkan, mereka melakukan penyimpanan data dengan cara laporan keuangan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy, dalam mengantisipasi akses ilegal yaitu dengan mengganti password secara berkala serta untuk kerusakan pada sistem ditangani dengan cara berkoordinasi dengan Tim Pusat Data Elektronik. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator keamanan data sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah Efektif (E).

b. Waktu

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, apabila dilihat dari indikator keamanan data dikatakan efektif dalam hal ini kecepatan waktu dalam proses penginputan data maupun laporan tidak menunggu lama karena sudah tersetting secara otomatis pada modul data *master*. Meskipun sering terjadi gangguan pada koneksi internet. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator waktu sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah Efektif (E).

c. Ketelitian

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dikatakan kurang teliti dalam melakukan proses input data, pengolahan data dan penyajian data khususnya pada dokumen TBP dan STS.. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban

responden mengenai indikator ketelitian sebanyak 75,2% dan terletak pada daerah Kurang efektif (KE).

d. Variasi laporan atau *output*

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sudah variatif dalam pembuatan laporan keuangan karena sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator variasi laporan sebanyak 83,2% dan terletak pada daerah Efektif (E).

e. Relevansi.

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dikatakan sudah relevan relevan karena penyajian, pengolahan dan penyimpanan data sudah sesuai dengan format yang ada pada sistem. Berdasarkan data yang diperoleh 25 responden maka jawaban responden mengenai indikator relevansi sebanyak 85,6% dan terletak pada daerah Sudah Efektif (SE).

Rata-rata jawaban responden

Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan jawaban responden diatas , maka dapat dihitung rata-rata jawaban responden :

$$\frac{83,2\%+83,2\%+75,2\%+83,2\%+85,6\%}{5} = 82,1\%$$

Tabel 5.15 Perhitungan Efektivitas Keseluruhan

No	Indikator	Persentase (%)
1	Modul Utility	83,2
2	Modul Data Master	82,4
3	Modul Penganggaran	82,4
4	Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan	80
5	Modul Akuntansi dan Pelaporan	80
6	Keamanan Data	83,2
7	Waktu	83,2
8	Ketelitian	75,2
9	Variasi Laporan /Output	83,2
10	Relevansi	85,6
	Jumlah Keseluruhan	818,4
	Efektivitas Keseluruhan	81,84

5.4 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Belum Berjalan Maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta Operatornya, faktor-faktor yang menghambat penerapan SIPKD belum berjalan maksimal adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan suatu organisasi, SDM dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan di kembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syamsurifal, Admin SIPKD pada hari Senin, 24 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

“Sumber Daya Manusia belum memadai dikarenakan sering terjadi mutasi pegawai pada operator di lingkungan OPD yang berdampak pada penyampaian laporan pertanggungjawaban yang seringkali tidak sinkron dan terlambat yang membuat kami kewalahan dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah dan juga terdapat ketidak merataan kualitas dan kuantitas SDM yang disebarkan di seluruh OPD, ada sebagian OPD yang kekurangan pegawai dari segi kuantitas dan kualitas, ada juga yang kekurangan pegawai dari segi kualitas meskipun kuantitasnya sudah mencukupi,”.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yakni faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah Sumber Daya Manusia yang belum memadai akibat sering kali terjadi mutasi pegawai operator yang menyebabkan penyampaian laporan pertanggungjawaban seringkali terlambat dan juga para pegawai operator belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPKD meskipun tersedia infrastruktur yang dapat digunakan.

b. Jaringan Internet.

Jaringan internet saat ini sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat dengan melalui perangkat-perangkat tertentu serta bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi diseluruh dunia, memudahkan pengolahan dan penyimpanan data serta berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syamsurifal, Admin SIPKD pada hari Senin, 24 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

“ Aplikasi SIPKD sering kali mengalami gangguan sistem akibat listrik yang seringkali padam secara terus menerus sehingga menyebabkan sistemnya sering kali bermasalah yang berujung pada keterlambatan penginputan data dengan banyaknya penumpukan dokumen-dokumen yang harus diinput sehingga penyusunan laporan keuangan seringkali terhambat.”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yakni faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah jaringan internet yang seringkali terganggu akibat listrik yang sering kali pada secara terus-menerus sehingga terjadinya keterlambatan penginputan data dan penyusunan laporan keuangan.

c. Bimbingan Teknis.

Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bimbingan teknis yang berkaitan dengan keuangan daerah didalamnya terdiri dari pelatihan-pelatihan untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar, juga diajari tentang pencatatan laporan keuangan, penyusunan, sampai penganalisa laporan keuangan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para pegawai yang diharapkan mampu menciptakan pegawai yang jujur, berkarakter dan berkompeten.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syamsurifal, Admin SIPKD pada hari Senin, 24 Juni 2019 dijelaskan bahwa:

“ Dalam penerapan SIPKD ini yang juga menjadi penghambatnya adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah pusat kepada para pegawai operator di setiap OPD apalagi dengan selalu di mutasikannya para pegawai operator membuat kami kewalahan untuk memeriksa kembali laporan keuangan setiap OPD dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yakni faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah pusat kepada para pegawai operator seluruh OPD.